

DAFTAR REFRENSI

A. BUKU

Hosnah, Asmak Ul, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea. *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Diedit oleh Diah Safitri. Rajawali Printing, 2021.

Mulkan, Hasanah, dan Serlika Aprita. *Hukum Otonomi Daerah*. Penerbit Mitra Wacana Media, 2023.

Mushafi. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktik*. Eureka Media Aksara, 2025.

Naidin Syamsuddin, Ganda Agustina Hartati Simbolon, Surni, Dkk. *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif*, 2023.

Sudrajat, Hendra, Ja'far Amir, Iving Arisdiyoto, Nawang Aviani, Loso Judijanto, Stats, Nany Suryawati, Heriyanto, Otti Ilham Khair, dan Yevi Dwitayanti. *Otonomi Daerah dan Good Governance*. Diedit oleh Anny Riwayati. Surabaya: CV. Mitra Mandiri Persada, 2024.

Sidiq, Umar, Miftachul Choiri, dan Anwar Mujahidin. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, 2019.

Syafliansah, Esti Royani, Juni Gultom, dan Hari Selamat. *Metode Penelitian Hukum*. Diedit oleh Weni Yuliani. Zahir Publishing, 2025.

Widjajanto, Agus, Ni Putu, Paramita Dewi, Muhamad Abas, Rizqa Febry Ayu, Ni Putu, Suci Meinarni, Fatimah Hs, Ni Wayan, dan Eka Sumartini. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*, 2023.

Yati Nurhayati, Irfani, M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," 2021, 1–20.

Naidin Syamsuddin, Ganda Agustina Hartati Simbolon, Surni, Resyi A. Gani, Halima Bugis, Mariana Marta Towe, Muhammad Guntur, et al. *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif*. Yayasan Hamjah Diha, 2023.

B. JURNAL

Annur, Rahmi Mailiza, Prodi Magister, Ilmu Hukum, Fakultas Pascasarjana, Universitas Pembangunan, dan Panca Budi. "Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" 3 (2023): 6126–34.

Khalimiy, Akhmad. "Pencabutan Peraturan Daerah Dalam Timbangan Negara Hukum," 2017.

Djuniarti, Abdul Azis, Harlina Hamid, dan Hambali. "Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Konteks Hukum dan Politik Nasional." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 1, no. 2 (2023): 47–60. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i2.497>.

Dr. Rahyunir Rauf, M.Si. "Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan Dengan Pemerintah Kelurahan Pada Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru" 1, no. 1 (2016): 192–224.

Rauf, Rahyunir, Zaheruddin Othman, Sri Maulidiah, Nina Yuslaini, Restu Hayati, dan Muhammad Hafizh Rahyunir. "Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Membantu Tugas Pemerintahan Di Kampung Mukim Singkir Yan Kedah, Malaysia," 2024.

Sofwan. "Urgensi partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah" 37, no. 1 (2022): 118–26.

Suharjono, Muhammad. "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah" 10, no. 19 (2014).

Pattinasarany, Yohanes. "Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah" 17, no. 4 (2011): 73–84.

C. SKRIPSI

Abdurrosit. "Politik Hukum Pengujian Peraturan Daerah: Studi Atas Uu Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Dan Putusan Mk Nomor 56/Puu-Xiv/2016 Skripsi." *Skripsi*, 2020.

Alexander, Vito. "Implikasi Yuridis Pembatalan Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1951 Tentang Tarif Kendaraan Tidak Bermotor Di Kota Yogyakarta," 2018.

T. Risman. "Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kritis Peralihan Kewenangan Pengujian dari Eksekutif Ke Yudikatif)," 2021.

Nadia, Oktaviani. "Tinjauan Yuridis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pencabutan Lima Buah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar" 5 (2022).

Nor, Fadillah. "Politik Hukum Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara,” 2022.

Safitri, Nur Ica. “Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia (Tinjauan Terhadap RUU KUHP),” 2022.

D. UNDANG-UNDANG/NASKAH

Indonesia, Republik. “PP Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan” 2005 (2005).

“Naskah Penjelasan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kota Tanjungpinang,” 2025.

“Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan,” 2021.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018,” 2018, 1–11.

“Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Rukun Warga Dan Rukun Tetangga,” 2024.

“Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah,” n.d.

“Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-undnagan,” 2011.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,” 2014.

E. BERITA/WEB

Redaksi. “Fraksi NasDem DPRD Tanjungpinang Sampaikan Pandangan Umum Atas 6 Ranperda Tahun 2021,” 2021. <https://wartarakyat.co.id/2021/01/14/fraksi-nasdem-dprd-tanjungpinang-sampaikan-pandangan-umum-atas-6-ranperda-tahun-2021/>.

F. WAWANCARA

Capt. Indra Satria, Ketua Panitia Khusus (*Pansus*) Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kota Tanjungpinang, wawancara pribadi, Tanjungpinang, 7 Januari 2026.

Zulhidayat, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, wawancara pribadi, Tanjungpinang, 5 Januari 2026.

Abu Bakar, Ketua RT 001/003 Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, wawancara pribadi, Tanjungpinang, 8 Januari 2026.

Ketua RT 002/003 Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, wawancara pribadi, Tanjungpinang, 8 Januari 2026.

Efry Thurdosadhi, Ketua RT 002/005 Kelurahan Tanjungpinang Timur, wawancara pribadi, Tanjungpinang, 11 Januari 2026.

Ashady Selayar, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang selaku ketua Panitia Khusus Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kota Tanjungpinang Periode 2019-2024, wawancara pribadi, Tanjungpinang, 2 Januari 2026.

